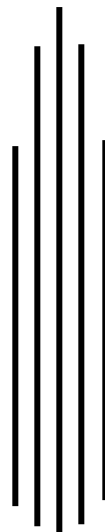




**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2012- 2017**



**PANGKALPINANG**

**2012**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa peningkatan mobilitas dan aksesibilitas transportasi berdampak besar terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi suatu daerah. Dalam salah satu misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 bahwa untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur transportasi.

Pembangunan dengan memanfaatkan dana publik harus dapat memberikan jaminan bahwa pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sebagaimana yang tercantum dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu perencanaan yang memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya, kebijakan transportasi yang tepat sasaran, sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan konsisten dengan pembangunan ekonomi yang dijalankan. Atas dasar pemikiran tersebut perlu disusun suatu rencana strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 sampai tahun 2017.

Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan memuat Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan serta Prioritas Pembangunan sektor Perhubungan baik Sektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut maupun Perhubungan Udara yang dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan dengan arah serta kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

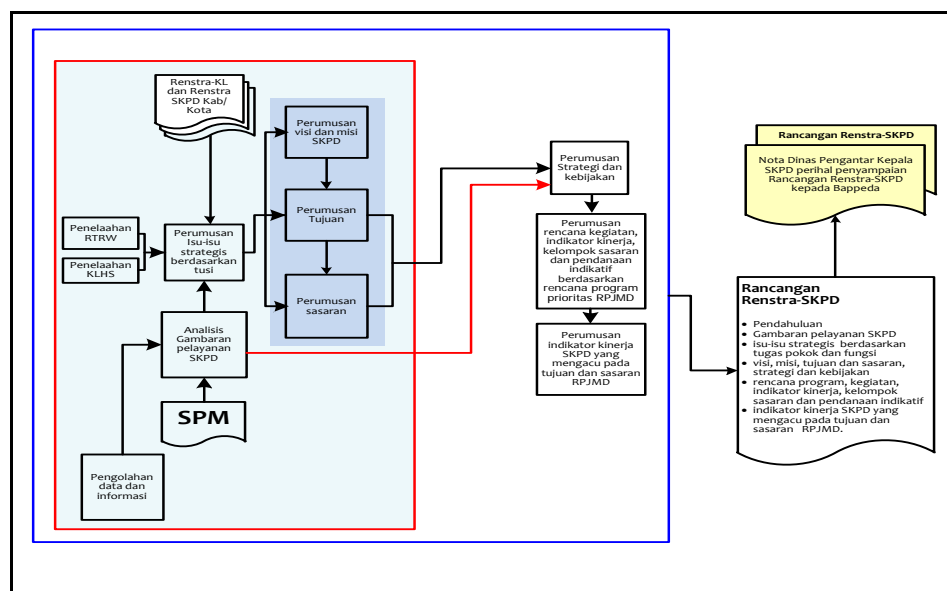
Tahapan penyusunan Rencana Strategis SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mencakup :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD

3. Review Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
4. Penelaahan RTRW provinsi
5. Analisis terhadap Dokumen KLHS
6. Perumusan isu-isu strategis
7. Perumusan visi dan misi SKPD
8. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provins
9. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi;
10. mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi;
11. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi;
12. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
13. perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi; dan
14. pelaksanaan forum SKPD provinsi.

Tahapan penyusunan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas diharapkan Rencana Strategis menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perhubungan berdasarkan pada :

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 1.2.6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 1.2.7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- 1.2.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 1.2.11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan  
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.2.12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.
- 1.2.13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/317/VI/2011 tentang Target Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan bidang perhubungan yang disusun untuk memberi arah dan acuan bagi SKPD Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di sektor perhubungan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah.

### **1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan berpedoman pada RPJMD Provinsi yang memperhatikan RPJMN. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan serta Prioritas Pembangunan sektor Perhubungan baik Sektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut maupun Perhubungan

Udara yang dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada RKPD dengan arah serta kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD dan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN kemudian diselaraskan melalui mekanisme Musrenbang.

Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 yang diaktualisasikan dalam bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pembangunan sektor perhubungan secara terpadu, berkesinambungan dan tepat sasaran.

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA SKPD**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perhubungan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan pengertian tentang Renstra SKPD secara ringkas, Dasar Hukum Penyusunan Renstra SKPD, Proses Penyusunan Renstra SKPD, Hubungan Renstra dengan Dokumen perencanaan daerah lainnya, Sistematika Penyusunan serta Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra SKPD.

##### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

**BAB II.** Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **BAB III.**

Dalam bab ini diidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L atau Renstra SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi faktor-faktor pelayanan SKPD.

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisi Visi dan Misi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh SKPD.

#### **BAB IV.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017.

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB V.** Berisi penjelasan indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VI.**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SKPD**



## **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

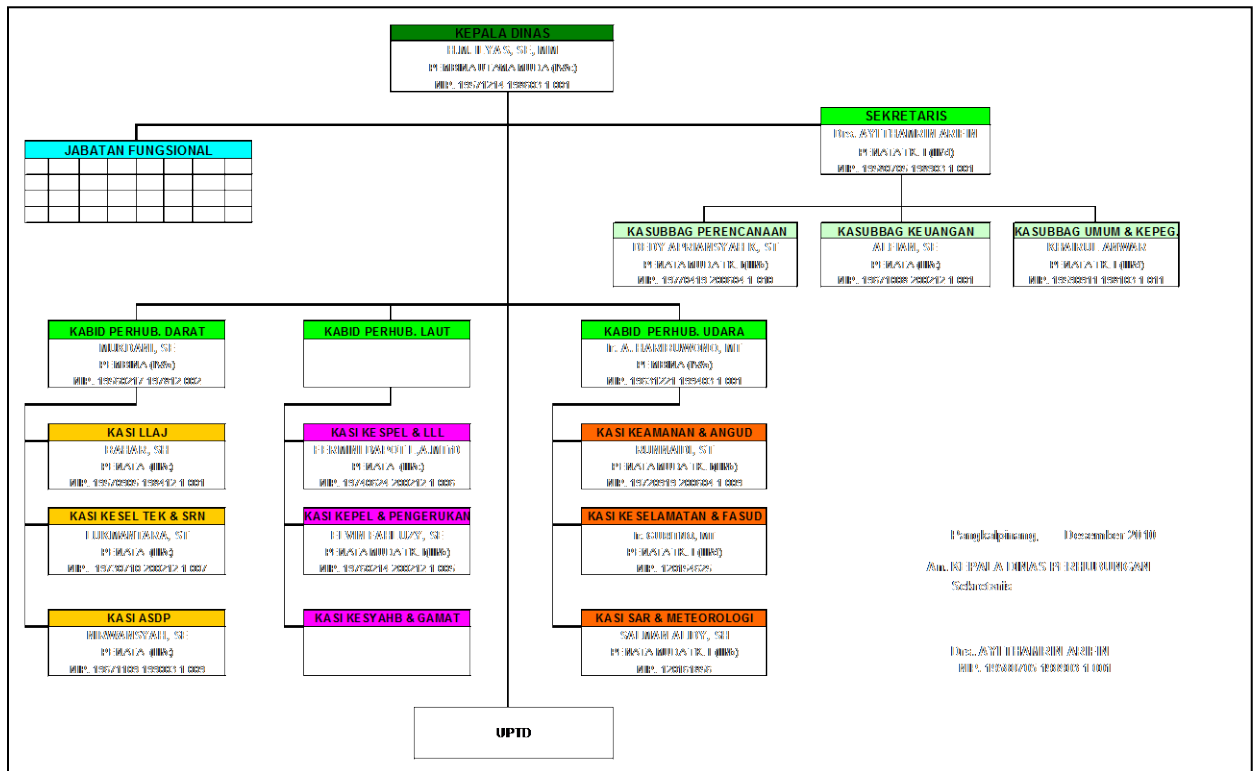
Pembentukan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang perhubungan
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Pengevaluasian dan membuat pelaporan
6. Pelaksanaan urusan kesekretariatan

Struktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a. 1 (satu) Jabatan Kepala Dinas yang setara dengan Jabatan Esselon II a;
  - b.
  - c. 1 (satu) Jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan Jabatan Esselon III a;
  - d. 3 (tiga) Jabatan Kepala Bidang yang setara dengan Jabatan Esselon III a;
  - e. 3 (tiga) Jabatan Kepala Sub Bagian di bawah Sekretariat yang setara dengan Jabatan Esselon IV a;
- 9 (sembilan) Jabatan Kepala Seksi di bawah Bidang yang setara dengan Jabatan Esselon IV a.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi  
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



**2.2. SUMBER DAYA SKPD**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini (akhir Desember 2013) didukung oleh 61 pegawai dengan status kepegawaian seluruhnya PNS. Kualifikasi Pendidikan Pegawai terdiri dari S2 sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, S1 sebanyak 21 (Dua Puluh empat) orang, DIV sebanyak 3 (tiga) Orang, D III sebanyak 6 (Enam) orang, DII sebanyak 2 (Dua) orang, SLTA sebanyak 12 (dua belas) orang dan SLTP sebanyak 2 (dua) orang

Berdasarkan Esselonning yang menduduki Jabatan Esselon II sebanyak 1 (satu) orang, Esselon III sebanyak 4 (Empat) orang, dan Esselon IV sebanyak 12 (dua belas) orang.

**Tabel 2.1  
Klasifikasi Pegawai di Dinas Perhubungan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	11	4	15
3	Sarjana / S1	15	6	21

4	Diploma-IV	3	-	3
5	Diploma-III	5	1	6
6	Diploma-II	1	1	2
7	SMU	12	-	12
8	SLTP	2	-	2
9	SD	-	-	-
JUMLAH		49	12	61

Selain SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan juga disertai wewenang dan tanggungjawab selaku pengguna anggaran baik dalam pemungutan retribusi maupun belanja. Tabel 2.2 menunjukkan anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja tahun 2007-2011.

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>22,950,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>16,850,000.00</b>	<b>25,800,000.00</b>	<b>20,750,000.00</b>	<b>23,500,000.00</b>	<b>45,267,000.00</b>
Pendapatan Asli Daerah	9,000,000.00	22,950,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	26,000,000.00	16,850,000.00	25,800,000.00	20,750,000.00	23,500,000.00	45,267,000.00
- Hasil Retribusi Daerah	9,000,000.00	22,950,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	26,000,000.00	16,850,000.00	25,800,000.00	20,750,000.00	23,500,000.00	45,267,000.00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7,505,135,676.19</b>	<b>10,623,677,262.19</b>	<b>14,608,691,201.00</b>	<b>12,689,748,618.00</b>	<b>10,078,793,671.60</b>	<b>3,887,029,934.00</b>	<b>9,151,036,416.00</b>	<b>13,924,394,636.00</b>	<b>10,165,342,272.00</b>	<b>8,424,976,854.00</b>
Belanja Tidak Langsung	2,839,201,826.19	2,849,332,935.19	2,429,917,026.00	3,971,248,618.00	4,299,053,671.60	1,622,724,381.00	2,392,536,298.00	1,964,790,908.00	2,283,700,537.00	3,094,633,970.00
- Belanja Pegawai	2,839,201,826.19	2,849,332,935.19	2,429,917,026.00	3,971,248,618.00	4,299,053,671.60	1,622,724,381.00	2,392,536,298.00	1,964,790,908.00	2,283,700,537.00	3,094,633,970.00
Belanja Langsung	4,665,933,850.00	7,774,344,327.00	12,178,774,175.00	8,718,500,000.00	5,779,740,000.00	2,264,305,553.00	6,758,500,118.00	11,959,603,728.00	7,881,641,735.00	5,330,342,884.00
- Belanja Pegawai				307,455,000.00	292,350,000.00				274,795,000.00	292,350,000.00
- Belanja Barang dan Jasa				2,172,158,400.00	1,541,817,100.00				2,041,906,155.00	1,291,895,384.00
- Belanja Modal				6,238,886,600.00	3,945,572,900.00				5,564,940,580.00	3,746,097,500.00

### 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan target fisik yang tercantum pada RPJMD 2007-2012 telah melampaui pada beberapa bagian, namun masih ada pula yang membutuhkan perbaikan pada tahun berikutnya. Tabel 2.3 menunjukkan indikator capaian dimaksud.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Capaian Bidang Perhubungan**

No	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Rambu Keselamatan Lalu lintas yang terpasang (buah)	150	671	447
2	Pemasangan Marka Jalan (meter)	75.000	20.000	26,66
3	Pemasangan Guardrail	8	4	50
4	Pemasangan Warninglight	3	19	633
5	Pengoperasian Jembatan Timbang (unit)	4	-	0
6	Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Depati Amir (meter)	-	-	-
7	Perpanjangan Landasan Pacu Bandara H.AS Hanandjoeddin (meter)	500	15.000	3000
8	Jumlah Pelabuhan Umum	10	11	110
9	Jumlah Pelabuhan Khusus	7	1	14,28

- Pelabuhan Khusus saat Ini Sangat Dibatasi, Dikarenakan Telah Tersedia Pelabuhan Umum

Pada tahun 2007 sampai dengan 2011, Dinas Perhubungan telah melaksanakan 11 program dengan 56 kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
5. Program Event Kalender Nasional;
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi;
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
11. Program Sosialisasi, Pendidikan dan Latihan.

Adapun tingkat realisasi dari pelaksanaan program-program tersebut yaitu:

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2012 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2007	6.000.000,00	2.500.000,00	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2007	51.000.000,00	29.183.103,00
		2008	5.275.000,00	5.275.000,00			2008	54.000.000,00	37.550.534,00
		2009	5.300.000,00	5.277.000,00			2009	59.400.000,00	34.476.612,00
		2010	6.000.000,00	5.999.000,00			2010	100.000.000,00	60.982.260,00
		2011	8.000.000,00	7.970.000,00			2011	120.000.000,00	53.616.834,00
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opr	2007	121.960.000,00	45.411.900,00	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2007	40.200.000,00	31.700.000,00
		2008	161.500.000,00	149.906.366,00			2008	30.000.000,00	25.800.000,00
		2009	177.650.000,00	174.674.000,00			2009	30.000.000,00	28.800.000,00
		2010	215.000.000,00	212.812.000,00			2010	30.000.000,00	29.400.000,00
		2011	188.940.000,00	152.925.000,00			2011	37.200.000,00	37.200.000,00
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2007	120.000.000,00	118.562.210,00	6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2007	-	-
		2008	114.950.000,00	114.945.910,00			2008	15.450.000,00	15.388.300,00
		2009	114.000.000,00	114.000.000,00			2009	39.280.000,00	37.812.000,00
		2010	120.000.000,00	119.998.000,00			2010	60.000.000,00	59.605.000,00
		2011	129.000.000,00	128.991.000,00			2011	60.000.000,00	59.986.000,00

7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2007	48.028.350,00	47.209.790,00	8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2007	30.000.000,00	22.144.950,00
		2008	43.755.550,00	43.673.650,00			2008	58.525.000,00	52.715.000,00
		2009	43.024.375,00	42.997.850,00			2009	52.600.000,00	52.570.000,00
		2010	30.000.000,00	29.917.020,00			2010	57.500.000,00	57.495.000,00
		2011	70.000.000,00	69.984.000,00			2011	62.500.000,00	62.485.000,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	2007	19.272.000,00	13.815.500,00	10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2007	2.160.000,00	2.123.000,00
		2008	37.410.000,00	26.761.000,00			2008	5.660.000,00	5.741.000,00
		2009	37.300.000,00	36.276.250,00			2009	6.226.000,00	5.800.000,00
		2010	20.000.000,00	19.980.000,00			2010	10.000.000,00	9.955.000,00
		2011	30.000.000,00	29.980.000,00			2011	10.000.000,00	9.959.000,00
11.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2007	440.000.000,00	439.195.600,00	12.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelola Administrasi Perkantoran	2007	152.100.000,00	57.950.000,00
		2008	423.400.000,00	421.766.600,00			2008	31.200.000,00	-
		2009	423.400.000,00	422.778.400,00			2009	-	-
		2010	400.000.000,00	397.886.600,00			2010	-	-
		2011	300.000.000,00	298.432.600,00			2011	-	-
13.	Kunjungan Kerja ke Kab/Kota	2007	260.640.000,00	12.750.000,00					
		2008	-	-					
		2009	-	-					
		2010	-	-					
		2011	-	-					

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	2007	1.291.360.350	822.546.053	63,70	
		2008	981.125.550	899.523.360	91,68	
		2009	988.180.375	955.462.112	96,69	
		2010	1.048.500.000	1.004.029.880	95,76	
		2011	1.015.640.000	911.529.434	89,75	
	Jumlah per Program		<b>5.324.806.275</b>	<b>4.593.090.839</b>	<b>86,26</b>	

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 13 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.324.806.275 dengan realisasi Rp.4.593.090.839 atau 86,26%.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pemeliharaan Rutin Berkala Gd. Kantor	2007	10.800.000,00	7.260.000,00	2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2007	103.050.000,00	99.170.000,00
		2008	97.427.976,00	96.930.973,00			2008	-	-
		2009	96.300.000,00	95.300.000,00			2009	50.850.000,00	49.850.000,00
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	90.000.000,00	85.476.200,00			2011	-	-
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2007	69.112.000,00	67.297.000,00	4.	Pengadaan Sarana Kelengkapan Gedung Kantor	2007	572.270.000,00	-
		2008	-	-			2008	661.874.400,00	643.441.400,00
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	95.000.000,00	92.500.000,00			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	2007	580.750.000,00	-	6.	Pengadaan Alat Absensi Sidik Jari	2007	-	-
		2008	-	-			2008	32.944.500,00	29.187.500,00
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	275.000.000,00	260.518.500,00			2011	-	-
7.	Pengadaan Meubeleir	2007	-	-	8.	Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	2007	-	-
		2008	-	-			2008	-	-
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	300.000.000,00	286.790.000,00			2010	-	-
		2011	-	-			2011	503.850.000,00	446.700.000,00

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2007	1.335.982.000	173.727.000	13,00	
		2008	792.246.876	769.559.873	97,14	
		2009	147.150.000	145.150.000	98,64	

	Aparatur	2010	395.000.000	379.290.000	96,02	
		2011	868.850.000	792.694.700	91,23	
Jumlah per Program			<b>3.539.228.876</b>	<b>2.260.421.573</b>	<b>63,87</b>	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.539.228.876 dengan realisasi Rp. 2.260.421.573 atau 63,87%.

### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur telah melaksanakan 1 (Satu) Kegiatan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	2007	40.150.000,00	-					
		2008	50.185.000,00	-					
		2009	-	-					
		2010	-	-					
		2011	-	-					

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2007	40.150.000	-	-	
		2008	50.185.000	-	-	
		2009	-	-	-	
		2010	-	-	-	
		2011	-	-	-	
Jumlah per Program			<b>90.335.000</b>	<b>0</b>	-	



Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang dijalankan dari 2007 – 2011 dengan capaian program meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam berpakaian dinas. Namun kegiatan pengadaan pakaian dinas tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan tersebut baru dimulai pada penghujung tahun anggaran sehingga dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

#### 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	2007	187.400.000,00	-	2.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	2007	210.530.000,00	-
		2008	186.999.000,00	181.567.000,00			2008	469.998.400,00	-
		2009	350.000.000,00	341.936.500,00			2009	-	-
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-
3.	Pemasangan Guard Rail	2007	-	-	4.	Pengadaan Rambu Penuntun Laut / Rambu Navigasi	2007	-	-
		2008	149.430.450,00	146.895.450,00			2008	500.000.000,00	486.829.000,00
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	-	-			2010	700.000.000,00	398.692.680,00
		2011	-	-			2011	125.000.000,00	93.215.500,00
5.	Pengadaan dan Pengawasan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	2007	-	-					
		2008	-	-					
		2009	-	-					
		2010	250.000.000,00	226.152.000,00					
		2011	-	-					

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
4	Program	2007	397.930.000	-	0,00	

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2008	1.306.427.850	815.291.450	62,41	
	2009	350.000.000	341.936.500	97,70	
	2010	950.000.000	624.844.680	65,77	
	2011	125.000.000	93.215.500	74,57	
Jumlah per Program		<b>3.129.357.850</b>	<b>1.875.288.130</b>	<b>59,93</b>	

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 5 (lima) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.129.357.850,- dengan realisasi Rp. 1.875.288.130,- atau 59,93%. Secara rinci kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Pengadaan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas
  - Ruas jalan Tanjungpandan – Sijuk
  - Ruas jalan Pangkalpinang – Kelapa dan ruas jalan Pangkalpinang - Koba
2. Pengadaan/pemasangan Guard Rail, ruas Jalan Pangkalpinang-Muntok (Ds. Kace)
3. Rambu penuntun laut/rambu navigasi
  - Pengadaan tiang rambu pada tahun 2008 sebanyak 2 (dua) unit dan lanjutan pemasangan lampu pada tahun 2011 di alur Kurau – Sungai Selan
  - Pengadaan rambu navigasi Tanjung Batu pada tahun 2010, dengan realisasi fisik 49% dan dilanjutkan pada tahun 2011 (kegiatan lanjutan termasuk dalam Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan).

## 5. Program Event Kalender Nasional

Pada Program Event Kalender Nasional telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Peringatan Hari Perhubungan Nasional	2007	-	-					
		2008	35.675.000,00	34.550.000,00					
		2009	-	-					

	2008	2010	-	-				
		2011	-	-				

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
5	Program Event Kalender Nasional	2007	-	-	-	
		2008	35.675.000,00	34.550.000,00	96,85	
		2009	-	-	-	
		2010	-	-	-	
		2011	-	-	-	
	Jumlah per Program		<b>35.675.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>96,85</b>	

Program Event Kalender Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2008 dengan capaian program terselenggaranya 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.675.000,- dengan realisasi Rp. 34.550.000,- atau 96,85%.

## 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pada Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pemeliharaan Alat Keselamatan Lintas	2007	15.000.000,00	-	2.	Rehabilitasi Gapura RPPJ	2007	-	-
		2008	44.999.001,00	44.497.000,00			2008	84.199.050,00	82.452.050,00
		2009	85.320.000,00	83.285.000,00			2009	-	-
		2010	95.000.000,00	92.362.400,00			2010	-	-

		2011	90.000.000,00	87.389.750,00		2011	-	
No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket		
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2007	15.000.000	-	0,00			
		2008	129.198.051	126.949.050	98,26			
		2009	85.320.000	83.285.000	97,61			
		2010	95.000.000	92.362.400	97,22			
		2011	90.000.000	87.389.750	97,10			
Jumlah per Program			<b>414.518.051</b>	<b>389.986.200</b>	<b>94,08</b>			

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 414.518.051,- dengan realisasi Rp. 389.986.200,- atau 94.08%.

### 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan telah melaksanakan 8 (Delapan) Kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi	No.	Kegiatan	Tahun	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan	2007	-	-	2.	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	2007	-	-
		2008	85.180.000,00	33.925.000,00			2008	30.999.950,00	28.618.650,00
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	15.000.000,00	12.706.000,00			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-
3.	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan AKUT	2007	-	-	4.	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	2007	-	-
		2008	29.994.250,00	26.644.250,00			2008	-	-
		2009	62.675.000,00	62.675.000,00			2009	64.420.000,00	64.420.000,00
		2010	75.000.000,00	74.879.950,00			2010	-	-

		2011	-	-			2011	40.000.000,00	40.000.000,00
5.	Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas / Road Map to Zero Overloading dan Pembinaan AKDP	2007	-	-	6.	Penyelenggaraan Rely Kapal Layar (Yacht Rally)	2007	-	-
		2008	-	-			2008	-	-
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	25.000.000,00	24.230.000,00			2010	-	-
		2011	-	-			2011	100.000.000,00	95.327.500,00
7.	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal dan Tahun Baru	2007	-	-	8.	Posko TCSE (Transportation, Custom, Secure and Quarantine) Sail Wakatobi Belitong 2011	2007	-	-
		2008	-	-			2008	-	-
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	70.000.000,00	68.185.000,00			2011	85.000.000,00	-

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2007	0	0	0,00	
		2008	146.174.200	89.187.900	61,01	
		2009	127.095.000	127.095.000	100,00	
		2010	115.000.000	111.815.950	97,23	
		2011	295.000.000	203.512.500	68,99	
	Jumlah per Program		<b>683.269.200</b>	<b>531.611.350</b>	<b>77,80</b>	

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 683.269.200,- dengan realisasi Rp. 531.611.350,- atau 77,80%.

## 8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan telah melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

N o	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi	N o	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pembuatan DED Sisi Udara Bandara Depati Amir	2007	-	-	2.	Pengadaan GPS, Theodolite dan Metal Detector	2007	-	-
		2008	1.250.000.000,00	1.244.556.585,00			2008	174.956.500,00	99.956.500,00
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-
3.	Pembangunan Lanjutan Cause Way	2007	-	-	4.	Pembuatan Peta Alur Pelayaran Pelabuhan Tj. Batu	2007	-	-
		2008	2.500.000.000,00	2.409.757.600,00			2008	-	-
		2009	-	-			2009	300.000.000,00	290.889.100,00
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-
5.	Pembangunan Shoulder	2007	-	-	6.	Pekerjaan Tanah di Daerah Glide Path dan Critical Area	2007	-	-
		2008	-	-			2008	-	-
		2009	6.229.314.400,00	6.164.131.200,00			2009	2.792.314.400,00	2.724.661.900,00
		2010	-	-			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-
7.	Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Tj. Batu (Retaining Wall)	2007	-	-	8.	Pengadaan dan Pemasangan SQFL	2007	-	-
		2008	-	-			2008	-	-
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	1.565.000.000,00	1.326.155.825,00			2010	3.500.000.000,00	3.354.301.000,00
		2011	480.000.000,00	471.858.000,00			2011	-	-
9.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi Tj.	2007	-	-	10.	Pembangunan Lanjutan Reeling Trestle	2007	-	-
		2008	-	-			2008	-	-
		2009	-	-			2009	-	-
		2010	-	-			2010	-	-

	Batu	2011	2.105.250.000,00	2.031.092.000,00			2011	750.000.000,00	667.525.000,00

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2007	0	0	0,00	
		2008	3.924.956.500	3.754.270.685	95,65	
		2009	9.321.628.800	9.179.682.200	98,48	
		2010	5.065.000.000	4.680.456.825	92,41	
		2011	3.335.250.000	3.170.475.000	95,06	
Jumlah per Program			<b>21.646.835.300</b>	<b>20.784.884.710</b>	<b>96,02</b>	

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 10 (sepuluh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.646.835.300,- dengan realisasi Rp. 20.784.884.710,- atau 96,02%.

### 9. Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

Pada Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi	No	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi
1.	Pembentukan Forum Koordinasi SAR	2007	-	-	2.	Pengadaan Alat SAR	2007	-	-
		2008	93.992.350,00	93.024.050,00			2008	96.938.150,00	20.253.750,00
		2009	-	-			2009	-	-

	Provinsi Babel	2010	-	-			2010	-	-
		2011	-	-			2011	-	-

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
9	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	2007	0	0	0,00	
		2008	190.930.500	113.277.800	59,33	
		2009	0	0	0,00	
		2010	0	0	0,00	
		2011	0	0	0,00	
Jumlah per Program			<b>190.930.500</b>	<b>113.277.800</b>	<b>59,33</b>	

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.930.500,- dengan realisasi Rp. 113.277.800,- atau 59,33%.

#### 10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi	No	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi
1.	Sosialisasi Standar Teknis dan Sertifikasi Sarana dan Prasaran Angkutan Udara	2007	-	-	2.	Koordinasi , Monitoring dan Pengumpulan Data	2007	-	-
		2008	67.999.800,00	61.485.000,00			2008	142.800.000,00	88.525.000,00
		2009	-	-			2009	225.000.000,00	223.965.000,00
		2010	-	-			2010	200.000.000,00	199.061.000,00
		2011	-	-			2011	50.000.000,00	49.476.000
3.	Pengadaan	2007	-	-	4.	Penyusun	2007	-	-



	Peta Laut	2008	6.625.000,00	6.150.000,00		an	2008	-	-
		2009	-	-		Jaringan	2009	500.000/000,00	475.904.116,00
		2010	-	-		Transpor-	2010	-	-
		2011	-	-		tasi Jalan	2011	-	-
5.	Rakornis Bidang Perhubung an	2007	-	-	6.	Penyusun	2007	-	-
		2008	-	-		an Site	2008	-	-
		2009	34.400.000,00	34.400.000,00		Plan Sisi	2009	250.000.000,00	248.503.800,00
		2010	50.000.000,00	50.000.000,00		Darat	2010	-	-
		2011	-	-		Pelabuhan	2011	-	-
						Tj. Batu			
7.	Penyusuna n Tatrawai	2007	-	-					
		2008	-	-					
		2009	-	-					
		2010	750.000.000,00	739.981.000,00					
		2011	-	-					

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2007	0	0	0,00	
		2008	217.424.800	156.160.000	71,82	
		2009	1.009.400.000	982.772.916	97,36	
		2010	1.000.000.000	989.042.000	98,90	
		2011	50.000.000	49.476.000	98,95	
	Jumlah per Program		<b>2.276.824.800</b>	<b>2.177.450.916</b>	<b>95,64</b>	

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.276.824.800,- dengan realisasi Rp. 2.177.450.916,- atau 95,64%.

### 11. Program Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Pada Program Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan telah melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib Perhubungan dengan target dan realisasi kegiatan dari tahun 2007-2011 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi	No	Kegiatan	Thn	Pagu Dana	Realisasi
1.	Sosialisasi Bidang Perhubungan Laut	2007	-	-					
		2008	-	-					
		2009	150.000.000,00	144.220.000,00					
		2010	-	-					
		2011	-	-					

No.	Program	Tahun	Target Dana Program	Realisasi	%	Ket
11	Program Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	2007	0	0	0,00	
		2008	0	0	0,00	
		2009	150.000.000	144.220.000	96,15	
		2010	0	0	0,00	
		2011	0	0	0,00	
	Jumlah per Program		<b>150.000.000</b>	<b>144.220.000</b>	<b>96,15</b>	

Program Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dilaksanakan dari tahun 2007 – 2011 dengan capaian program terselenggaranya 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi Rp. 144.220.000,- atau 96,15%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 4 (empat) jenis

pelayanan dasar dengan 17 (tujuh belas) rincian yang menjadi mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi sebagai pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Dengan memperhatikan kondisi saat ini terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dan kebutuhan serta potensi daerah, untuk lima tahun kedepan, Dinas Perhubungan merumuskan rencana strategis yang diharapkan mampu mengurai permasalahan transportasi secara komprehensif.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Perhubungan pada 5 (Lima) Tahun mendatang antara lain :

##### **2.4.1. Integrasi Jaringan Transportasi Intermoda dan antar Wilayah**

Merupakan peluang untuk meningkatkan perdagangan domestik serta industri di wilayah Sumatera dan Zona Karimata.

##### **2.4.2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di daerah pelosok, sebagai antisipasi percepatan pemerataan pembangunan di Wilayah Bangka Belitung sehingga mendorong terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Bangka dan Kawasan Free Trade Zone di Pulau Belitung.**

Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan Bandara, Pelabuhan Laut, Angkutan Perairan, dan Angkutan Massal.

##### **2.4.3.**

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Dinas Perhubungan adalah selaku perumus kebijakan teknis, memberikan perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota, fungsi pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan

urusan kesekretariatan. Dalam menterjemahkan wewenang tersebut, kebijakan yang melandasi adalah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa transportasi dan reposisi Dinas Perhubungan dalam rangka *good governance*.

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini terutama, adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi jika dibandingkan dengan permintaan akan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi oleh Pemerintah dan BUMN, yang tarif pelayanannya cenderung di bawah harga (*underpriced*). Hal itu terjadi karena kebijakan tarif yang diambil masih lebih menekankan pertimbangan politis daripada pertimbangan finansial. Akibatnya, kinerja dan pelayanan transportasi di Indonesia pada umumnya belum optimal. Keterbatasan kemampuan pendanaan oleh pemerintah untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap aset yang sudah terbangun merupakan permasalahan klasik yang selalu mengemuka, yang juga berakibat pada ketidakmampuan melakukan investasi baru (*underinvestment*) untuk memenuhi pertambahan permintaan pelayanan, sedangkan partisipasi investor swasta masih sangat rendah. Implikasinya adalah tidak terlayannya seluruh permintaan akan layanan transportasi terutama pada trayek-trayek perintis.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dalam misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global yang bertujuan:

- a. Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.
- b. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.

dengan sasaran yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas.
- b. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
- c. Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan, lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas negara.

Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu prasyarat utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya saing internasional, serta untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Begitu juga dengan penyediaan infrastruktur transportasi, sudah menjadi keyakinan umum bahwa peningkatan mobilitas dan aksesibilitas transportasi berdampak besar terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi. Dampak ini bisa berlaku langsung dan tak langsung. Dampak langsung antara lain melalui besaran nilai investasi langsung di sektor transportasi sebagaimana digambarkan dalam penerimaan PDB sub sektor transportasi. Dampak tidak langsung pada ekonomi adalah melalui mekanisme perubahan aksesibilitas, yang justru memberikan dampak lebih besar pada ekonomi melalui efek *multiplier* pada sektor lain.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD**

Visi Kementerian Perhubungan 2009-2014 adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat

(*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Pelayanan Transportasi dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian yang mendorong permintaan masyarakat akan moda transportasi khususnya di daerah-daerah terpencil, pengembangan wilayah, peningkatan produksi di berbagai bidang dan munculnya paradigma baru yang menuntut keterkaitan (*interaksi*), keterpaduan (*interelasi*), serta saling membutuhkan (*interdependensi*) antar pranata (*institusi dan regulasi*) semua bidang kehidupan yang harus diantisipasi dengan Sistem Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM),

dan penegakan hukum secara konsisten

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Menelaah rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Kementerian Perhubungan, terlihat adanya benang merah yang menjadi perhatian baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sektor perhubungan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan
2. Meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah atau perkotaan dan perdesaan
3. Reformasi birokrasi dalam hal kelembagaan, peraturan, dan SDM.

**Tabel III.1**

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra SKPD**

No	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran pada	
		Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Jumlah Rambu Keselamatan Lalu lintas yang terpasang (buah)	Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang selamat, aman,nyaman , tertib, teratur dan terjangkau sebagai implementasi “road map to	-	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan



		zero accident”	Minimal;
2	Pemasangan Marka Jalan (meter)	Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang selamat, aman,nyaman , tertib, teratur dan terjangkau sebagai implementasi “road map to zero accident”	Meningkatny a keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
3	Pemasangan Guardrail	Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang selamat, aman,nyaman , tertib, teratur dan terjangkau sebagai implementasi “road map to zero accident”	Meningkatny a keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
4	Pemasangan WarningLight	Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang selamat, aman,nyaman , tertib,	Meningkatny a keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan

		teratur dan terjangkau sebagai implementasi “road map to zero accident”	prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
5	Pengoperasian Jembatan Timbang (unit)	Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang selamat, aman,nyaman , tertib, teratur dan terjangkau sebagai implementasi “road map to zero accident”	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
6	Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Depati Amir (meter)	Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi dalam rangka mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta perluasan lapangan pekerjaan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;

7	Perpanjangan Landasan Pacu Bandara H.AS Hanandjoeddi n (meter)	Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi dalam rangka mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta perluasan lapangan pekerjaan	-	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
8	Jumlah Pelabuhan Umum	Terwujudnya Kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi di seluruh wilayah kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas masyarakat	-	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
9	Jumlah Pelabuhan Khusus	Terwujudnya Kepastian dan stabilitas	-	Meningkatnya aksesibilitas

penyediaan	masyarakat
jasa	terhadap
transportasi di	pelayanan
seluruh	sarana dan
wilayah	prasarana
kepulauan	transportasi
Bangka	guna
belitung	mendorong
untuk	pengembang
meningkatkan	n
kelancaran	konektivitas
distribusi	antar
barang, jasa	wilayah;
dan mobilitas	
masyarakat	

#### **3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Telaahan RTRW bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dengan membandingkan struktur dan pola ruang yang ada saat ini akan diperoleh identifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor transportasi SKPD Dinas Perhubungan berupaya membangun infrastruktur transportasi baik sektor Transportasi Darat, Transportasi Laut maupun Transportasi Udara dengan memaksimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah serta mempertimbangkan dampak pembangunan dan pengembangan terhadap Lingkungan Hidup.

Setiap usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan transportasi selain menimbulkan polusi yang bersumber dari emisi gas buang, juga berupa kebisingan serta pencemaran limbah, terutama di kawasan perairan maupun di pelabuhan penyeberangan dan bandar udara.

Transportasi merupakan sektor yang mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang cukup besar. Ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM telah menimbulkan kekhawatiran karena jumlah cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia terbatas dan pembakaran BBM menimbulkan pencemaran dan juga berdampak pada perubahan iklim.

Karena dampak pencemaran udara yang sangat merugikan ini maka pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai aturan, yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1999, yang mengamanatkan agar pencemaran terhadap udara dapat ditanggulangi melalui penentuan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara). Selain itu juga telah dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 141 tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan yang Sedang Diproduksi, yang merinci besaran-besaran kendali yang perlu diperhatikan pada emisi kendaraan bermotor.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 antara lain :

- 3.5.1. Potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi-provinsi di wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan sinergi bagi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu diperlukan dukungan jaringan transportasi wilayah karena kondisi saat ini kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera belum berkembang secara optimal. Jaringan transportasi jalan, angkutan sungai, angkutan laut dan udara belum terintegrasi dengan baik.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah terutama di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas, rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah, perlunya

- 3.5.2. pengembangan infrastruktur strategis yang direncanakan pada tahap sebelumnya seperti Pengembangan Pelabuhan Laut, Peningkatan Status Jalan dan pengembangan system transportasi diharapkan dapat mendukung aksesibilitas antar wilayah dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi seperti pembangunan bandara dan pelabuhan laut masih belum terwujud karena masih adanya konflik pemanfaatan ruang terkait kebutuhan ruang untuk investasi dengan penetapan 45% hutan lindung.

- 3.5.3. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah

Peningkatan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional.

- 3.5.4. Peningkatan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan.

Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kelian Kalian (Muntok – Bangka Barat) sebagai upaya mendukung pengembangan kawasan perhatian investasi.

- 3.5.5. Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah.

3.5.6.

3.5.7.

#### **BAB IV**

#### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI SKPD DINAS PERHUBUNGAN**

• Visi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017 adalah ***“Terwujudnya Transportasi Terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”***

Misi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah :

4.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang handal dan memberikan nilai tambah;

4.1.2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana serta SDM Transportasi;

4.1.3. Mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;

4.1.4. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan proporsional melalui diklat teknis operasional dan penjenjangan.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

SKPD Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan pelayanan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas,



maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang berdampak pada maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Pertumbuhan sektor transportasi diupayakan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, perluasan lapangan kerja, menjamin kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi di daerah terpencil, pemerataan pelayanan jasa transportasi di seluruh wilayah Bangka Belitung dan terwujudnya Tataran Transportasi Wilayah yang memaksimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah serta ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan sektor transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

4.2.1. Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang selamat, aman,nyaman, tertib, teratur dan terjangkau sebagai implementasi “road map to zero accident”.

4.2.2. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi dalam rangka mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta perluasan lapangan kerja;

4.2.3. Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas masyarakat;

4.2.4. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan Nasional.

Meningkatnya aksesibilitas angkutan di daerah terpencil, pulau-pulau berpenduduk dan lintas Provinsi

4.2.5. Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi yang memaksimalkan pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah serta terciptanya Tataran Transportasi Wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan

4.2.6.

### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD**

#### **4.3.1. STRATEGI SKPD DINAS PERHUBUNGAN**

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah disebutkan di atas SKPD Dinas Perhubungan melaksanakan pembangunan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (Tujuh) Pilar strategi antara lain :

4.3.1.1. Pembangunan transportasi dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya sehingga menghasilkan pengembalian biaya baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;

Pembangunan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial budaya dan pertahanan wilayah sehingga hasil pembangunan sector perhubungan memiliki daya guna tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;

4.3.1.2.

Pembangunan transportasi difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sector-sector lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;

4.3.1.3.

Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

4.3.1.4. Pembangunan transportasi dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Pembangunan transportasi dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistic dan rasional;

4.3.1.5.

Pembangunan transportasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan baik pada skala kecil,

4.3.1.6.

menengah maupun besar.

#### 4.3.1.7.

Sebagai implementasi 7 (Tujuh) Strategi di atas, SKPD Dinas Perhubungan menerapkan Pola Dasar Penyelenggaraan Perhubungan melalui Program 6 (Enam) P yaitu :

a. Pengembangan dan Pembangunan

Melakukan kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara;

Pengelolaan dan Pemeliharaan

b. Mengelola UPT sebagai asset desentralisasi dan dekonsentrasi serta memelihara fasilitas yang sudah ada;

Pembinaan dan Pengawasan

c. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggara dan stake holder transportasi serta masyarakat pengguna jasa transportasi.

#### **4.3.2. KEBIJAKAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN**

Kebijakan SKPD Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

4.3.2.1. Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara;

Mengembangkan system transportasi di Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhitungkan aspek geografis, sumberdaya manusia, potensi sumber daya alam, aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan wilayah;

Pertumbuhan dan Efisiensi Daerah;

4.3.1.2. Menyediakan transportasi yang berkualitas guna meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi daerah dengan memperhitungkan asas pemerataan dan stabilitas pelayanan jasa transportasi sampai ke pelosok daerah Kepulauan Bangka Belitung;

Koordinasi Inter, Antar Sektor dan Antar Moda;

4.3.2.3. Meningkatkan koordinasi antar sector, sub sector transportasi atau antar moda transportasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang terpadu guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan Nasional;

Rencana Terpadu dan Pengembangan Teknologi;

4.3.2.4. Melaksanakan pembangunan transportasi di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan perencanaan yang terpadu dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara sarana, prasarana, kebutuhan tenaga, keahlian dan teknologi;

Persyaratan Teknis, Keselamatan dan Keamanan;

Mengawasi penyelenggaraan Transportasi di Kepulauan

Bangka Belitung sehingga sesuai dengan persyaratan teknis, keselamatan, keamanan dan tata tertib lalu lintas yang telah ditetapkan;

Fungsi Penunjang dan Fungsi Pendorong;

4.3.2.5.

Melaksanakan kebijakan pelayanan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengupayakan program pelayanan transportasi perintis sebagai pendorong pembangunan daerah;

Dukungan terhadap sektor-sektor lain;

4.3.2.6.

Kebijakan pembangunan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mendukung kelancaran imobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sector-sektor yang berbasis sumber daya alam yang strategis dalam upaya menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi;

Pembangunan Transportasi Berkelanjutan;

4.3.2.7.

Pembangunan Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkelanjutan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energy, serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan;

Melibatkan Peran Serta Masyarakat (Sektor Swasta);

4.3.2.8.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diupayakan melibatkan peran serta masyarakat (swasta) dan diarahkan sesuai bidang yang dibutuhkan oleh

masyarakat;

Kemudahan Angkutan Massal;

Memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan angkutan massal yang melayani jaringan transportasi utama di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.2.9.

4.3.2.10

**B A B V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program pembangunan transportasi baik darat, laut dan udara tahun 2012–2017 bertujuan untuk mendukung transportasi yang lancar, terpadu dan nyaman sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, juga memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran, ditempuh dengan menetapkan beberapa program yang harus diimplementasikan dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaannya secara optimal.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas perencanaan untuk jangka menengah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selama 5 tahun. Selain itu juga tpenetapan program ini mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **5.1. PROGRAM STRATEGIS**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

### **5.1.1. PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT**

#### **1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu-Lintas Angkutan Jalan.**

Program ini bertujuan meningkatkan kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.

#### **2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.**

Program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan dan antarkota.

#### **3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan.**

Program ini secara umum juga bertujuan untuk peningkatan keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah..

#### **4. Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ.**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik.

## **5. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP.**

Program ini dilaksanakan dikarenakan adanya kebutuhan peningkatan prasarana infrastruktur guna keselamatan, keamanan dan kelancaran pelayanan asdp. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah prasarana dermaga dan meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi serta meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan, terutama untuk kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan serta pelayanan angkutan perintis.

## **6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Dermaga, Sungai, Danau dan Penyeberangan.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelaikan dan kualitas sarana pelayanan asdp

### **5.1.2. PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT**

#### **1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterhubungan antar pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga keterhubungan dari dan keluar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatkan kinerja pelabuhan untuk mendukung pola pergerakan barang dan penumpang.

#### **2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut.**

Program ini merupakan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi laut dan kepelabuhan secara efektif dan efisien

#### **3. Program Kegiatan Dasar dan Keperintisan.**

Program ini dilaksanakan dengan membangun kapal-kapal perintis yang sesuai bagi daerah yang membutuhkan serta dengan menyiapkan perencanaan jenis, ukuran dan jumlah kebutuhan kapal perintis sesuai cakupan wilayah.

### **5.1.3. PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA**

#### **1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara.**

Program ini bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional melalui pemenuhan prosedur kerja, standar pelayanan dan on time performance serta implementasi ketentuan keselamatan penerbangan secara optimal.

#### **2. Program Pembangunan Transportasi Udara.**

Program ini merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk mewujudkan pengembangan/ pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara secara efektif dan efisien dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara, serta melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum

### **5.1.3. PROGRAM PEMBANGUNAN PENUNJANG SEKTOR TRANSPORTASI**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara**

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan**

Program ini secara umum juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan aparaturnya perhubungan khususnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **4. Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Data/Informasi**

Melalui Program Pengembangan Data/Informasi diharapkan dapat tersedia Dokumen perencanaan dan data/informasi baik berupa hasil pembangunan dan potensi yang dapat digunakan untuk mendukung penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah.

#### **5.2. KEGIATAN STRATEGIS**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan program di atas, maka disusun kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - i. Penyediaan bahan logistik kantor
  - j. Penyediaan makanan dan minuman

- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini yaitu:
    - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dan rumah dinas
    - b. Pengadaan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
    - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
    - d. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana gedung kantor dan rumah dinas
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan  
Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini yaitu:
    - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
    - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
    - c. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perhubungan
  4. Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Data/Informasi Perhubungan  
Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
    - a. Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
    - b. Penyusunan program dan rencana kerja pembangunan
    - c. Penelitian dan pengkajian kebijakan transportasi
    - d. Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
    - e. Penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi
    - f. Pengumpulan dan Analisis data base pelayanan angkutan
    - g. Inventarisasi data penelitian daerah rawan kecelakaan
    - h. Revisi penyusunan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    - i. Manajemen dan rekayasa lalu lintas
  5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu-Lintas Angkutan Jalan

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan timbang
- b. Rehabilitasi /pemeliharaan Faskes LLAJ
- c. Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Rehabilitasi Terminal tipe B

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
- c. Pengadaan RPPJ
- d. Pengadaan Marka Jalan
- e. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
- f. Pengadaan Delineator
- g. Pengadaan Cermin Tikungan
- h. Pengadaan Warning Light
- i. Pengadaan APILL Tenaga Surya
- j. Pengadaan LPJU Tenaga Surya
- k. Pengadaan Paku Marka
- l. Pengadaan Pita Penggaduh
- m. Pembangunan Jembatan Timbang
- n. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- o. Peningkatan Sarana Terminal tipe B

7. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengadaan Bus Perintis
- b. Subsidi perintis angkutan jalan

8. Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini adalah:

- a. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat
- b. Kegiatan Penyuluhan bagi para supir/ juru mudi.
- c. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
- d. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- e. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan.

9. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini adalah

- a. Peningkatan dan pembangunan dermaga penyeberangan baru dan lanjutan
- b. Pembangunan Dermaga Sungai
- c. Pengerukan Alur Pelayaran.
- d. Pembangunan fasilitas keselamatan rambu suar
- e. Pengadaan Kapal baru dan lanjutan
- f. Pengadaan Bus Air
- g. Subsidi perintis ASDP
- h. Peningkatan pengembangan akses angkutan sungai dan lintas penyeberangan antar Provinsi dan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Dermaga, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan
- b. Rehabilitasi Terminal Pelabuhan
- c. Rehabilitasi Dermaga sungai

11. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut

Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengawasan Pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung
  - b. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut
  - c. Pembangunan SBNP
  - d. Pembangunan Dermaga/Pelabuhan di Pulau-pulau Kecil Berpenduduk.
12. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut
- Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Laut
  - b. Lanjutan rehabilitasi/pemeliharaan pembangunan Faspel Laut
13. Program Kegiatan Dasar dan Keperintisan
- Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
- a. Pembangunan baru kapal perintis
  - b. Subsidi Angkutan Laut Perintis
  - c. Peningkatan dan Pengembangan keterhubungan antar pulau dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan keterhubungan dari dan keluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - d. Pembentukan rute pelayaran
14. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara
- Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Bangunan Bandar Udara
  - b. Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas landasan pacu, taxiway, Apron
  - c. Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan penerbangan
15. Program Pembangunan Transportasi Udara
- Kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :
- a. Pembangunan dan Pengembangan fasilitas Bandar Udara
  - b. Pembangunan perpanjangan landasan pacu, taxiway, Apron



- c. Pembangunan dan pengembangan Bangunan Terminal, gedung operasional, Jalan dan Pagar
- d. Pembangunan lahan parkir, jaringan instalasi drainase, jaringan air bersih dan saluran pembuangan air limbah
- e. Pekerjaan pembebasan lahan dan penimbunan tanah
- f. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan
- g. Pemasangan peralatan Navigasi
- h. Penambahan rute penerbangan
- i. Subsidi keperintisan
- j. Pembangunan Bandara perintis / helipad pada pulau-pulau terpencil

### **5.3. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama yang menjadi objek perencanaan pembangunan diantaranya adalah aparatur dan program/kegiatan pembangunan daerah.

### **5.4. PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.

Rincian program, kegiatan indikator kinerja serta pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 adalah sebagaimana terlampir.



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
SKPD DINAS PERHUBUNGAN**

Visi	Misi	Strategi	Indikator Kinerja Program (berdasarkan IKU/SPM)	Program	Target Capaian															
					Kondisi Sekarang	2013		2014		2015		2016		2017						
						Target	Dana (dalam juta rupiah)	Target	Dana (dalam juta rupiah)	Target	Dana (dalam juta rupiah)	Target	Dana (dalam juta rupiah)	Target	Dana (dalam juta rupiah)					
Terwujudnya Transportasi Terpadu, Aman, Nyaman, dan Terjangkau Sebagai Pendorong Utama Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang handal dan memberikan nilai tambah 2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana serta SDM Transportasi 3. Mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi 4. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan	Pembangunan transportasi dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya sehingga menghasilkan pengembalian biaya baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia Jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	62,07		1.475		1.690		2.700		2.950		2.750					
										4 unit	800	4 unit	800	2 unit	400					
						1 Keg	75	1 Keg	100	1 Keg	125	1 Keg	150	1 Keg	175					
						1 Keg	100	1 Keg	135	1 Keg	150	1 Keg	180	1 Keg	200					
						1 Keg	75	1 Keg	90	1 Keg	100	1 Keg	120	1 Keg	135					

	proporsional melalui diklat teknis operasional dan penjenjangan	Pembangunan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial budaya dan pertahanan wilayah sehingga hasil pembangunan sektor perhubungan memiliki daya guna tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Teladan Keselamatan Lalin	1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	175	1 Keg	200	1 Keg	225
			Penyelenggaraan Lomba LALIN (WTN)	1 Keg	300	1 Keg	315	1 Keg	350	1 Keg	375	1 Keg	390
	Pengumpulan dan Analisis database pelayanan Angkutan		1 Keg	175	1 Keg	250	1 Keg	250	1 Keg	300	1 Keg	300	
	Koordinasi dalam Pembangunan dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (rakornis)		1 Keg	200	1 Keg	200	1 Keg	200	1 Keg	225	1 Keg	225	
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan		1 Keg	100	1 Keg	150	1 Keg	200	1 Keg	200	1 Keg	250	
	Pemilihan Perusahaan AKAP dan Pariwisata Terbaik		1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	175	1 Keg	200	1 Keg	225	
	Pembangunan transportasi difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang		1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	175	1 Keg	200	1 Keg	225	
	Pemilihan dan penghargaan Sopir/juru mudi/AKUT		1 Keg	150	1 Keg	150	1 Keg	175	1 Keg	200	1 Keg	225	

		memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah					0		0		10.450		1.000		1.250	
			Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	Pembangunan Terminal Induk type B di Sungailiat	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					1 paket	7500					
				Penyusunan DED Terminal Terpadu Pangkalpinang						1 paket	450					
				Pembangunan Sarana dan prasarana Terminal angkot Sungailiat						1 Paket	1000	1 Paket	1000	1 Paket	1250	
				Pembangunan Terminal Terpadu Pangkalpinang (dana pendamping)						1 Paket	1500					
		Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.		Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas		7.350		7.000		12.900		12.400		7.000	
				Pemasangan Rambu Lalin			400	1200	400	1.250	400	1.350	450	1.400	500	1.500
				Pemasangan Marka Jalan		51,72	60 km	2400	50 km	2.000	50 km	2.000	50 km	2.000	32 km	1.750
				Pemasangan pagar pengaman jalan			500 m	800	500 m	800	600 m	900	500 m	800	500 m	800
				Pemasangan Warning Light			7 unit	600	7 unit	600	7 unit	600	7 unit	600	7 unit	600

						2 Unit	800	2 Unit	800	2 Unit	800	1 Unit	800	1 unit	800
						1000 buah	750	1000 buah	750	1000 buah	750	1000 buah	750	1000 buah	750
		Pembangunan transportasi dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat				1200 buah	450	1200 buah	450	2000 buah	900	1200 buah	450	1200 buah	450
						7000 m	350	7000 m	350	7000 m	350	7000 m	350	7000 m	350
										123 unit	5.250	123 unit	5.250		
							<b>150</b>		<b>1.750</b>		<b>2.250</b>		<b>1.050</b>		<b>1.050</b>
		Pembangunan transportasi dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro daerah, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARA		1 Paket	150	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	300	1 Paket	300
										1 paket	500	1 paket	750	1 paket	750

			Pengadaan alat pengujian Kendaraan Bermotor	NA DAN FASILITAS LLAJ				1 paket (tahap 1)	1.500	1 paket (tahap 2)	1.500						
		Tersedianya Kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi terputus oleh perairan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			<b>0</b>		<b>3.500</b>		<b>5.000</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
			Pengadaan bus Air							3.500		3.500		3.500	3.500		
			pengadaan Kapal									1.500					
	Pembangunan transportasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan baik pada skala kecil, menengah maupun besar	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	28,57		<b>10.375</b>		<b>5.000</b>		<b>54.000</b>		<b>17.000</b>	<b>19.000</b>			
			Pembangunan Dermaga di Pulau Mendanau												1 unit	7.000	
			Pembangunan Dermaga di Pulau Seliu										1 unit	7.000			
			Pembangunan Dermaga di Pulau Sumedang										1 unit	7.000			
			Pembangunan Dermaga di Pulau Lepar										1 unit	7.000			

--	--

Pembangunan Dermaga di Pulau Tg. Gading					1 unit	7.000				
Pembangunan Dermaga di Pulau Tg. Pongok									1 unit	7.000
Pembangunan Dermaga di Pulau Batu Betumpang			1 unit	5.000						
Pembangunan Dermaga di Pulau Bangka Kota					1 Keg (tahap I)	5.000	1 Keg (tahap 2)	5.000		
Pembangunan Dermaga di Pulau Permis							1 Keg (tahap I)	5.000	1 Keg (tahap 2)	5.000
Pembangunan Dermaga di Pulau Panjang					1 unit	7.000				
Pembangunan Dermaga di Pulau Tujuh	1 unit	7.000								
Pembangunan Dermaga di Pulau Bukulimau					1 unit	7.000				
Pembangunan Dermaga di Pulau nangka					1 unit	7.000				





--	--

pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	Pengawasan Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	
	Peningkatan pelabuhan Laut Tanjung Batu						1 Paket (tahap 1)	15.000	1 Paket (tahap 2)	7.500	1 Paket (tahap 3)	7.500	
	Pembangunan Drainase Jalan Masuk Pelabuhan Tg Batu								1 Paket	1.275			
	pembangunan Menara Pengawas terminal pelabuhan Tg. Batu			1 Paket	1.775								
	Perluasan halaman parkir Pelabuhan Tg.Kalian							1 Paket	2.750				
	Pembangunan Sarana Penunjang Pelabuhan Dendang							1 Paket (tahap 1)	5.000	1 Paket (tahap 2)	7.000	1 Paket (tahap 3)	5.000
	Pembangunan Pelabuhan Laut Tg. Berikat							1 Paket (tahap 1)	5.000	1 Paket (tahap 2)	5.000	1 Paket (tahap 3)	5.000
	Pembangunan Dermaga pelabuhan Sungai selan (Tanjung Tedung)							1 Paket (tahap 1)	5.000	1 Paket (tahap 2)	5.000	1 Paket (tahap 3)	5.000
Terpenuhinya Standar		Program Pembang	25,00		0		0	5.000		0		0	

			Keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pengerukan Alur Pelayaran Bangka Selatan	unan Sarana dan Prasarana Perhubungan					1 Paket	5.000					
			Tersedianya kapasitas dan Aksesibilitas pelayanan jasa Transportasi udara					19.952		18.800		15.000		2.750	2.750	
				Lanjutan Pembuatan Halaman Parkir Bandara	Program PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN dan Program Sarana dan Prasarana Perhubungan					1 Paket	800					
				Pekerjaan penimbunan tanah didaerah landas pacu bandara H.AS.Hanandjoeddin			1 Paket	19.952	1 Paket	18.000	1 Paket	15.000				
				Pembangunan Gedung Vip Bandara Depati Amir									1 Paket	2.750	1 Paket	2.750
TOTAL								44,727		38,440		145850		71600	61125	

**B A B VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah terpencil serta untuk mempelancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa agar mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama Dinas Perhubungan sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; melakukan penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan; serta pembinaan agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Secara umum indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan peningkatan ekonomi dan daya saing di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, kawasan tertinggal dan kawasan terpencil untuk menciptakan kesetaraan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Terwujudnya keberlanjutan reformasi dan restrukturisasi di bidang perhubungan dalam rangka memberi peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk dapat berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good government

